
KOALISI POLITIK DAN BARGAINING POSITION RAKYAT

Oleh:

Jonson Rajagukguk

Maringan Panjaitan

Dosen Tetap Administrasi Publik UHN Medan

ABSTRAK

Koalisi adalah sebuah metode untuk membangun sebuah rezim kekuasaan. Melalui koalisi pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Saat ini koalisi adalah sebuah politik yang sangat riil dan ditempuh oleh para elite politik dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Koalisi adalah sebuah paradigma politik yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun kekuasaan politik yang stabil. Melalui koalisi ini sangat diharapkan bagaimana stabilitas politik dibangun oleh para elite politik. Dengan adanya koalisi ini sangat diharapkan agar pelayanan publik bisa berjalan dengan kepada semua warga negara. Sekali lagi koalisi politik adalah sebuah cara untuk membangun kekuatan agar pemerintahan kuat dan stabil sehingga berjalan efektivitas masyarakat.

Kata Kunci: koalisi politik, *bargaining position* rakyat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jika kita melihat kebelakang dimana koalisi yang dibangun oleh parpol tentu sangat lemah dari sisi ideologi dan juga sisi lainnya. Sebagai contoh misalnya, hiruk pikuk koalisi meminta jabatan menteri dalam kabinet Jokowi adalah hal yang wajar dalam dinamika demokrasi pada masa lalu misalnya. Dalam politik praktis kita sering mendengar istilah “*no free lunch*” (tidak ada makan siang yang gratis). Koalisi yang dibangun oleh kubu Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PAN, dan Partai lainnya kini di persimpangan jalan.

Masa depan parpol oposisi jadi melemah karena paradigma berpikir yang salah (*misquided thought*). Disinyalir ada parpol yang tidak siap jadi oposisi murni (*pure opposition*) dengan alasan tidak mendapatkan apa-apa. Padahal, dalam demokrasi yang berkelanjutan butuh oposisi murni yang cerdas, kritis, sehat dan membangun. Jika jagat perpolitikan kita tidak punya oposisi sehat dan membangun ini adalah sebuah kemunduran besar. Ingat teori Lord Acton yang mengatakan “*power tend to corrupt*” (kekuasaan cenderung korupsi). Intinya, kekuasaan butuh pengawasan agar berjalan dengan baik dan benar.

Ketika koalisi sedang jadi pembahasan siapa mendapatkan apa dalam hal perebutan jatah menteri, apakah elite politik lupa bahwa yang paling bagus dalam membangun koalisi adalah berkoalisi dengan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Yang memilih Jokowi-Maruf Am'in adalah rakyat. Sudah seharusnya Jokowi dan Maruf harus lebih takut kepada rakyat daripada parpol yang mengusungnya (koalisi parpolnya). Dalam hal ini, paradigma berpikir rakyat adalah tuan atas Pemerintahan Jokowi –Maruf kedepan harus dilembagakan dengan baik dan benar.

Masalahnya, apakah dalam posisi partai oposisi atau partai yang mendapat jatah menteri semuanya nantinya akan bermuara kepada upaya memperjuangkan kepentingan rakyat yang lebih besar. Mengapa demikian? Bukankah dalam tata kelola pemerintahan dalam arti luas (eksekutif dan legislatif) dan pemerintah dalam arti sempit (eksekutif) semuanya akan memperjuangkan kepentingan rakyat? Dalam hal inilah semua parpol harus menyadari, menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah sama-sama bagus dalam posisi memperjuangkan rakyat (fighting for the people).

Kembali kepada topik berkoalisi dengan rakyat, seperti apa terjemahan berkoalisi dengan rakyat? Bukankah bergabung di kabinet atau menjadi partai oposisi adalah sama-sama bagus dalam memperjuangkan kepentingan rakyat? Untuk itu, berkoalisi dengan rakyat

punya terjemahan atau turunan sebagai berikut. Pertama, dalam memperjuangkan rakyat tentu tidak cukup dengan wacana atau ceritra. Selain program yang konkret, butuh komitmen dan implementasi langsung dimana indikator program itu tentu kata kuncinya adalah dampak yang ditimbulkan (out come). Semua program pemerintah, apakah program pembangunan, program pendidikan, program kesehatan semuanya didanai oleh APBN yang notabene adalah uang rakyat. Untuk itu, program itu harus punya parameter yang jelas dan terukur (the parameters are clear).

Parameter itu bisa dikur dengan angka statistik, indikator –indikator yang bisa dilihat di lapangan, serta kemanfaatan dari program itu (kemaslahatan bersama). Untuk itu, niat yang baik dalam menjalankan program dan tidak melakukan korupsi adalah hal yang paling utama dalam menjalankan program pemerintah. Selama ini kegagalan pembangunan di negara kita salah satu faktor penyebabnya karena tata kelola yang tidak bagus (tidak profesional) dan juga tingkat korupsi yang sangat parah. Akibatnya, program apapun yang dijalankan oleh pemerintah semuanya mengalami kegagalan. Untuk itu, revolusi mental dalam konteks inilah sangat dibutuhkan agar tata kelola program pembangunan bisa berjalan dengan baik dan punya manfaat yang sangat besar bagi rakyat.

Tujuan Penulisan

a. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

-
- b. Melihat sejauh mana fungsi dan tujuan koalisi yang sesungguhnya dan bisa memberikan masukan
 - c. Melihat sejauh mana fungsi dan tujuan koalisi untuk kepentingan publik yang lebih besar
 - d. Melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi daripada koalisi untuk membangun stabilitas pemerintahan rakyat yang efektif

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusa Djuyandi dalam tulisannya bahwa Adanya perbedaan ideologi partai politik dalam suatu negara tidak selamanya dapat menghambat proses politik dan upaya pencapaian tujuan nasional, sepanjang masing-masing partai memiliki kesadaran untuk mendahulukan pentingnya urusan bangsa dan negara dibandingkan dengan urusan-urusan yang sifatnya hanya menguntungkan kelompok dan dirinya sendiri (Jurnal Humaniora Vol 2 Tahun 2011). Sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill bahwa rasa kebangsaan akan menciptakan sebuah kepentingan bersama, yang juga memberikan suatu kekuatan dasar yang memadukan warga negara yang pada akhirnya menurut pandangan Mill akan menciptakan suatu kondisi politik yang stabil "*nationality, as 'a principle of sympathy', a 'feeling of common interest', supplied the strong basis of cohesion amongst a citizenry which he saw as an essential condition of political stability*" (O' Sullivan, 2000: p. 157).

John Stuart Mill lebih jauh menjelaskan bahwasanya dalam kebangsaan kesuksesan dari perundingan demokrasi membutuhkan diantaranya pertimbangan dan sebuah keinginan untuk mencapai pemufakatan dalam kerjasama sosial "*In On Nationality he has argued, further, that the success of 'deliberative democracy' requires trust amongst those deliberating and a willingness to find agreed terms of social co-operation*" (O' Sullivan, 2000: p. 157).

Pada dasarnya kita tidak bisa melihat definisi dari ideologi hanya dari satu sudut pandang sebab pandangan yang hanya menitikberatkan pada satu sisi atau satu sudut pandang akan mengakibatkan kurangnya informasi yang kita dapatkan, hal tersebut tentunya akan berdampak kepada stigma negatif terhadap salah satu ideologi atau terhadap ideologi. Oleh karena itu penting kiranya kita melihat ideologi dari dua sisi yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa Rejai, bahwa kita perlu membedakan ideologi sebagai sebuah konsep dan ideologi sebagai sebuah doktrin politik "*it is necessary to distinguish between ideology as concept and ideology as political doctrine*" (Sargent, 1990: p. 1).

Jika kita merujuk kembali kepada koalisi merah putih dua kali unjuk kekuatan (show of forces). Pertama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) takluk kepada koalisi merah putih dalam voting RUU Pilkada dimana Kepala Daerah kembali diberikan kepada pola pemilihan yang lama. Kedua dengan pemilihan ketua DPR RI, dan ketiga dengan menguasai

Ketua MPR RI. Praktis koalisi merah putih saat ini sedang menguasai parlemen. Dengan menguasai parlemen, apa gerangan yang akan dilakukan oleh KMP ini? Beredar isu di tengah masyarakat bahwa KMP akan menggajal apa yang jadi program Jokowi-JK. Aroma politik balas dendam (*political faceless*) lebih kental, sekalipun KMP menolak dengan tegas, jelas bahwa mereka menguasai parlemen dengan tujuan menjadi kekuatan penyeimbang agar pemerintahan Jokowi-JK bisa efektif untuk melayani masyarakat. Benarkah demikian?

Kekalahan KMP dalam pilpres telah membuat pentolan KMP memutar otak menguasai parlemen. Revisi UU MD3 akhirnya menguntungkan KMP karena pemilihan Ketua DPR RI dilakukan lewat pemilihan. Seyogyanya dalam draf UUMD3 yang lama, bahwa siapa yang menang dalam pemilu legislatif otomatis hak Ketua DPR RI berasal dari partai pemenang. Sebelumnya ketua DPR RI dipegang oleh Ketua Partai Demokrat karena Partai Demokrat adalah pemenang pemilu legislatif sebelumnya (2009). Dinamika politik yang terjadi mengalami perubahan, dengan strategi politik yang sangat lihai, jitu, terlepas apakah ini etis atau tidak, tergantung persepsi masyarakat, partai pemebnang pemilu legislatif tidak bisa jadi otomtais menjadi ketua DPR RI. Revisi UUMD3 memaksa PDI P dan koalisinya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) takluk oleh jurus ampuh politik KMP. Sudah dua episode KIH takluk oleh KMP. Dalam komunikasi politik ini merupakan sebuah sinyal betapa KIH

harus mencari format yang baru untuk menghadapi agresivitas KMP.

Sekali lagi, unjuk kekuatan (*show of forces*), itulah yang mungkin dilakukan oleh koalisi merah putih pada Jokowi-JK bahwa mereka merupakan kekuatan yang sangat solid. Sinyal ini dikirim pada Jokowi-JK sebagai sebuah pesan komunikasi politik. Tinggal lagi bagaimana Jokowi-JK bisa menanggapi ini sebagai sebuah masalah, solusi untuk membangun bangsa, atau sebagai kekuatan rival yang memang dipersepsikan akan jadi kekuatan pengganggu.

Melihat nihilnya karakter kenegarawanan politik dalam diri semua politisi bangsa kita, menjadi oposisi seringkali diparadigmakan sebagai kekuatan pengganggu yang akan melakukan politik balas dendam. Sementara dalam tradisi, bahkan praktik politik di berbagai negara yang sudah sangat maju demokrasinya, oposisi sangat menentukan arah politik bangsa tersebut karena sifatnya membangun sebagai kekuatan penyeimbang.

Artinya, oposisi melakukan tindakan korektif atas dasar keinginan menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan transparan, dan bukan untuk melakukan politik balas dendam. Di negara kita, politisi seringkali tersdandera pragmatisme habis dari para petinggi elite partai. Bahkan para anggota DPR kita lebih takut kepada partai daripada kepada rakyat yang memilihnya. Dengan demikian, ideologi perjuangan yang seharusnya

dimaksimalkan sebagai “patron” dalam membela rakyat justru terpinggirkan karena politisi yang terlalu sibuk melayani kepentingan parpol dan juga kepentingan pribadi.

Pada akhirnya, gejala ini bisa kita lihat dengan banyaknya anggota DPR yang tertangkap oleh KPK, kinerja yang sangat lemah, program legislasi nasional yang tidak jalan, sampai pada molornya pembahasan berbagai produk UU dan anggaran. Masalahnya, mengapa gejala negatif ini sangat sulit hilang dari wajah anggota DPR kita? Setidaknya, jawaban yang mungkin bisa kita berikan adalah karena kekuatan parpol yang sangat dominan dan tidak memberi ruang pada kadernya mengembangkan prestasi politik, sekalipun harus berbeda haluan dengan parpol yang mengusungnya.

Bisa saja misalnya, secara pribadi para anggota DPR yang tergabung dalam koalisi merah putih banyak yang tidak setuju dengan garis partainya mengembalikan pilkada pada DPRD. Tetapi, hanya karena garis partai memutuskan seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka harus dipatuhi sebagai sebuah kebenaran mutlak politik yang tidak bisa dikompromikan. Akibatnya, partai gagal sebagai rumah yang ramah pada ideologi perjuangan, cita-cita mulia, dan juga kreativitas politik lainnya.

Apa yang dilakukan oleh koalisi merah putih dengan berhasilnya mereka mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD merupakan bentuk dari unjuk kekuatan. Sekalipun sudah ada tekanan dari

berbagai elemen “*civil society*” supaya pilkadasung tetap dipertahankan, tetap saja koalisi merah putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PAN kukuh dengan pendirian mereka yang tentu sangat sulit diterima oleh nalar publik.

Oleh para ilmuwan politik, bahkan tokoh masyarakat, dan juga oleh masyarakat sendiri masih sangat yakin bahwa mekanisme pilkada langsung masih jauh lebih baik, lebih efektif, lebih terukur untuk mencari kepala daerah yang punya inovasi, integritas, kompetensi, dan juga visi kedaerahan. Mengingat dalam pilkada langsung, calon independen bisa dimajukan dan banyak calon Kepala Daerah yang sudah berhasil sebagai produk dari pilkada langsung.

Ada Basuki Thahaja Purnama (Ahok), ada Tri Rismaharani (Walikota Surabaya), Joko Widodo (Solo), dan juga sederet Bupati/ Walikota lainnya yang telah mengukir banyak prestasi untuk rakyat. Kini, kran mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung itu telah ditutup oleh DPR dengan menggolkan RUU Pilkada langsung, dimana mekanismenya dikembalikan kepada DPRD.

Dampkan dari pengembalian kepada DPRD ini tentu sangat besar negatifnya daripada positifnya. Berbagai kajian dari akademisi pun kalau kita simpulkan, lebih banyak dampak negatif dari pemilihan kepala daerah via DPRD. Money politic dalam “skala raksasa” bisa saja terjadi. Mengingat pilkada sebelumnya, praktik politik uang sangat masif dilakukan. Sederhana saja, dari 40 anggota DPRD nantinya, tinggal

menguasai 21 orang maka kemenangan akan di tangan.

Secara umum, kultur politik di negara kita adalah demokrasi yang traksaksional. Saat ini saja di tingkat DPRD, untuk bisa duduk sebagai anggota DPRD saja sudah mengeluarkan cost politik yang tidak tanggung –tanggung. Buktinya, setelah pelantikan anggota DPRD banyak anggota DPRD yang langsung menggadaikan SK nya di Bank Daerah masing-masing. Secara etika politik, ini sangat tidak pantas dan tidak patut. Anggota DPRD telah menunjukkan bahwa demokrasi kita memang demokrasi yang sangat traksaksional. Konon lagi nantinya kalau mereka yang disuruh memilih Kepala Daerah. Yang bakal terjadi adalah “bisik-bisik” berapa yang dikasih. Politik wani piro kembali bergaung. Ini akan jadi ancaman yang sangat masif yang mengabaikan partisipasi rakyat.

Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Koalisi merah putih merupakan bentuk show of forces sebagai sinyal yang sangat buruk bagi Jokowi-JK. Apa yang mereka lakukan adalah bentuk kemunduran politik. Masalahnya, mengapa koalisi merah putih menggunakan momentum pilkada ini sebagai unjuk kekuatan dengan mendorong demokrasi yang kita bangun harus kembali masuk kubangan kotor elite politik?

Bukankah koalisi merah putih bisa menggunakan momentum lainnya kalau mereka mau unjuk kekuatan? Setidaknya, rakyat telah jadi korban yang

sangat masif, tersistem, dan terstruktur dari perilaku elite politik koalisi merah putih di DPR RI. Kita tidak mengerti, apa alur berpikirnya koalisi merah putih sampai mengorbankan sistem pilkada langsung yang telah kita bangun bersama. Pilkada langsung oleh koalisi merah putih telah merusak mental masyarakat.

Argumentasi mereka sangat lemah. Biaya yang mahal, konflik sosial, dan berbagai masalah lanjutan lainnya seperti mengadu ke MK sangat tidak masuk akal. Aturan teknisnya yang perlu didorong lebih baik agar berlangsung secara demokratis. Sebagai contoh, semua calon dilarang kampanye dengan menggunakan baliho besar-besar di jalanan. Bisa saja porsi untuk kampanye diberi bobot yang sama di media yang telah dihunjak oleh pemerintah dan KPUD misalnya.

Berbagai aturan teknis pun bisa di desain sedemikian rupa demi mencari kepala daerah yang kompeten dan berintegritas. Dengan demikian tidak ada alasan mengembalikan pilkada via DPRD hanya dengan alasan pemborosan dan efisiensi anggaran. Toh, pada akhirnya money politic akan lebih masif dilakukan jika pilkada kembali dikembalikan kepada DPRD. Mengingat DPRD kita bukan produk politik dari fase pemilihan yang rasional dan sehat, tetapi sara dengan politik traksaksional.

Terlepas daripada itu, yang kita khawatirkan bersama, koalisi merah putih hanya menggunakan momentum RUU Pilkada ini, pemilihan Ketua DPR RI

dan Ketua MPR RI untuk unjuk kekuatan (show of forces) kepada rival politik mereka, bahwa kami merupakan kekuatan yang solid untuk membenturkan program Jokowi-JK. Paradigma berpikir seperti ini sangatlah sesat, apalagi sampai mengorbankan kepentingan rakyat.

Kalau pun berposisi, jadilan oposan yang membangun dengan mengkritik ke arah yang baik dan benar. RUU Pilkada yang diinisiasi oleh koalisi merah putih (KMP), perebutan Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI merupakan bentuk permainan politik yang kurang etis karena begitu mudahnya melakukan utak atik aturan untuk kepentingan partai, sekalipun itu mengatasnamakan rakyat. Akhirnya peradaban politik kita mengalami kemunduran yang sangat hebat. Sungguh, untuk kesekian kalinya rakyat jadi tumbal dari permainan politik tanpa ideologi, cita-cita luhur, tanpa orientasi kerakyatan, seperti atraksi politik koalisi merah putih (KMP) yang hanya bertujuan mengejar kekuasaan sekalipun mengatasnamakan rakyat.

Paradigma pemahaman seperti ini harus dimiliki oleh parpol. Berkoalisi dengan rakyat berarti punya pengertian bahwa aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan publik harus didahulukan dengan cepat, efektif, dan efisien. Dengan demikian, memperjuangkan kepentingan rakyat bukan hanya sekedar “lips service” semata, atau komoditas politik semata.

Kedua, berkoalisi dengan rakyat berarti menjadikan rakyat sebagai “tuan” atau

“majikan”. Biasanya pekerja sangat takut kepada majikan. Semua parpol, apakah dalam kabinet atau di luar kabinet nantinya harus menempatkan rakyat sebagai tuang yang harus dilayani. Bahkan pertanggungjawaban yang paling tinggi tentu kepada rakyat. Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden Jokowi dan Maruf perlu menyadari sedini mungkin paradigma berpikir rakyat adalah majikan mereka (the people are sir). Kalau bukan karena rakyat tentu mereka-mereka tidak akan terpilih. Untuk itu, mengelola kepercayaan rakyat (social trust) adalah hal yang sangat penting untuk dipahami.

Modal sosial yang telah diberikan oleh rakyat ini dalam bentuk kepercayaan (public trust) ini harus dikelola dengan baik dengan memberikan rakyat “kue pembangunan” atau arah berbangsa yang benar dan baik dengan capaian – capaian yang bermanfaat bagi rakyat. Untuk itu, kata kunci dalam mengelola kepercayaan rakyat ini adalah menjadi pemerintah dan legislator yang inovatif, berintegritas dan punya visi jauh kedepan. Perilaku pemerintahan dan perilaku legislator yang ditampilkan adalah perilaku yang jauh dari korupsi.

Pengalaman kita membuktikan banyak Gubernur, DPR yang terkena OTT oleh KPK adalah wujud nyata bahwa korupsi adalah ancaman nasional yang sangat nyata bagi bangsa ini. Gaji besar yang cukup dan fasilitas pendukung lainnya bukan jaminan perilaku korupsi sudah hilang. Bahkan cenderung makin menjadi –jadi sekalipun sudah banyak yang terkena OTT.

PENUTUP

Apapun peran yang dilakukan oleh partai yang masuk kabinet (partai pendukung pemerintah) dan partai oposisi (di luar pemerintah) semuanya itu sangat bagus. Demokrasi yang sehat dan maju (*good democracy*) butuh oposisi yang membangun pula. Saatnya semua parpol yang berkoalisi memikirkan bahwa koalisi yang paling penting dilakukan adalah berkoalisi dengan rakyat (*coalition with the people*). Berkoalisi dengan rakyat adalah amanah tunggal demokrasi karena dalam demokrasi pertanggung jawaban tertinggi pekerjaan seorang politisi adalah kepada rakyat. Untuk itu, semua koalisi yang dibangun harus punya pemahaman yang sama, visi yang sama, bahwa berkoalisi dengan rakyat adalah keharusan dan tanggung jawab tertinggi (*highest responsibility*) dalam kehidupan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Althusser, L. (2004). Tentang ideologi. (O. V. Arnof, Terj.). Yogyakarta: Jalasutra.
Cahyono, R. H. (1999).

Menahan laju Golkar dan Habibie. Diakses dari <http://jurnalis.wordpress.com/1999/05/25/menahan-laju-golkar-dan-habibie/> [25/05/1999]

Sargent, L. T. (1990). Contemporary political ideologies: A reader. California: Brooks/Cole.

Vaezi, A. (2006). Agama politik: Nalar politik islam. (A. Syahab, Terj.). Jakarta: Citra.